

Gaya Komunikasi Politik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Masa Kerja Aktif 2016-2017

Frengki Ramadhan, Nathalia Perdhani Soemantri, Sayyidah Afifah

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila
Jalan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, Indonesia

ABSTRAK

Situasi politik kian memanas sejak menjelang Pilpres 2014, yang pada saat itu salah satu kandidatnya adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Terpilihnya Jokowi menjadi presiden RI di Pilpres 2014 menggeser kursi kekuasaan gubernur DKI Jakarta yang diduduki oleh wakilnya yaitu Ir. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Gaya komunikasi politik yang dimiliki oleh Ahok dikenal sangat berbeda dari gubernur sebelumnya. Ahok tidak sedikit terlibat dalam beradu argumen dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah. Ketika dalam diskusi memiliki sudut pandangan yang berbeda, Ahok tidak sungkan mengatakan dengan gaya komunikasi yang keras, *to the point*, dan tidak jarang terkesan seakan menyudutkan lawan bicaranya. Pada masa jabatan selama dua tahun memimpin pemerintahan DKI Jakarta, tidak sedikit Ahok terlibat pada beberapa konflik. Konflik yang paling mengemuka adalah kasus hukum penistaan agama yang mengakibatkan dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini membuat gaya komunikasi politik Ahok di periode tahun ke dua sedikit berbeda dengan tahun pertama. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan kualitatif. Konsep yang digunakan yakni komunikasi, komunikasi politik, dan gaya komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan gaya komunikasi politik Ahok secara umum, namun terdapat sedikit lebih kalem dari biasanya, lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan komunikasi politik, serta lebih percaya diri secara psikologis.

Kata Kunci: Ahok, Gaya Komunikasi, Komunikasi Politik

***Political Communication Style Governor of Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) in Active Working Period 2016-2017***

ABSTRACT

The political situation has been heating up since the lead-up to the 2014 Presidential Election, when the Governor of DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), was one of the candidates. Jokowi's election as the President of Indonesia in the 2014 Presidential Election has shifted the governorship of DKI Jakarta to his deputy, Ir. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok's political communication style is known to be very different from that of previous governors. In addressing issues, Ahok often engaged in heated arguments to response problems. When discussion presented different perspectives, Ahok does not hesitate to speak in a firm, to-the-point manner, and often seems to corner his interlocutors. During his two years leading the DKI Jakarta administration, Ahok was involved in several conflicts. The most prominent conflict was the blasphemy case, which led him to be a suspect. This case has implications to Ahok's style of political communication in his second year to be slightly different than his first period. This research employs an interpretive paradigm with a qualitative approach. The concepts used communication, political communication, and communication style. The findings of this study indicate that there was no general change in Ahok's political communication style, but it was slightly calmer than usual, more cautious in delivering political messages, and more psychologically confident.

Keywords: *Ahok, Communication Style, Political Communication*

PENDAHULUAN

Keadaan politik di Indonesia kian memanas terkhusus setelah Pemilihan Presiden 2014 yang mana dimenangi oleh pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla atas lawannya Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Kenaikan Jokowi menjadi orang nomor satu di Indonesia ini menjadikan wakil gubernur menggantikan posisi gubernur DKI Jakarta secara prosedural. Perpolitikan kian menjadi sorotan karena rentang waktu pemilihan presiden dengan pemilihan gubernur DKI Jakarta selanjutnya memiliki jarak yang sangat cocok untuk melakukan permainan politik dari masing-masing kubu. Pertaruhan untuk memperkuat suara dari masing-masing kubu ditandai dengan keberhasilan memenangi pemilihan gubernur di ibu kota Jakarta dalam upaya mengincar kursi RI 1 pada Pilpres 2019.

Ir. Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dikenal dengan sebutan Ahok ini dalam memimpin pemerintahan DKI Jakarta sekurangnya berjalan selama 2 (dua) periode kalender kerja (2014-2015 dan 2016-2017). Pada saat menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok memiliki gaya komunikasi yang berbeda dengan Jokowi dalam menyelesaikan permasalahan ibu kota Jakarta pada konteks pemerintahan. Gaya komunikasi yang keras dan arogan ini sering sekali dibandingkan dengan pemimpin pendahulunya, yakni Jokowi. Tidak sedikit isu yang menyerang Ahok selama memimpin DKI Jakarta, namun tidak sedikit juga yang menyatakan Ahok tidak takut terhadap isu tersebut karena memiliki pelindung langsung dari presiden yaitu Jokowi. Seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dipukul-ratakan sesuai keinginan semua orang. Secara kultur, Ahok dan Jokowi memiliki dua karakter yang sangat berbeda.

Komunikasi politik adalah aktivitas yang merupakan wujud dari pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses interaksi. Aktivitas tersebut berlangsung dalam beragam bentuk dan level komunikasi. Di dalamnya tercipta bentuk pemahaman dan pemaknaan diri serta proses penciptaan realitas yang melibatkan banyak pihak. Seluruh aspek kehidupan modern saat ini telah melibatkan proses komunikasi. Salah satunya adalah politik yang menitikberatkan pada strategi dalam proses pengelolaan kekuasaan yang melibatkan pemimpin, rakyat, media, dan komponen sistem sosial, ekonomi, budaya, bahkan agama (Wahid, 2016).

Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, tetapi juga melibatkan lembaga pemerintahan dan masyarakat. Sumber atau komunikator politik dapat meliputi mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik dalam masyarakat yang dapat mendorong jalannya pemerintahan (Subiakto, 2012). Menurut pendapat Riswandi (2009), komunikasi politik memandang esensi komunikasi sebagai interaksi sosial, dan esensi politik sebagai konflik sosial, dan Nimmo merumuskan komunikasi politik sebagai kegiatan yang bersifat politis atas dasar konsekuensi aktual dan potensial yang mengatur perilaku manusia dalam kondisi politik. Komunikasi politik melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Almond (1996) lebih lanjut menerangkan komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik, berkaitan dengan ketertarikan mengenai isu-isu politik, pembuatan peraturan politik, aturan aplikasi, dan aturan-aturan lainnya yang melibatkan proses serta tindakan komunikasi (Wahid, 2016). Cangara (2016) juga menyatakan komunikasi politik seperti halnya dengan disiplin komunikasi lainnya, maka komunikasi politik sebagai *body of knowledge* juga terdiri atas berbagai unsur, yakni sumber (komunikator), pesan, media, atau saluran, penerima, dan efek (Nimmo, 2012).

Sementara itu, politik di Indonesia yang berkembang saat ini adalah gaya komunikasi berdiskusi langsung dengan masyarakat seakan pemimpin dan rakyat tidak memiliki batas secara khusus. Gaya komunikasi menurut Liliweri (2011), terdapat sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) elemen yang melekat, yaitu: (1) *Emotive Style Traits*, gaya komunikasi selalu aktif namun lembut, inisiatif sosial, dan merangkul orang dengan informal; (2) *Director Style Traits*, gaya menyampaikan pendapat seperti orang sibuk, tidak memandang orang lain, serius dan suka mengawasi orang lain; (3) *Reflective Style Traits*, gaya mengontrol emosi, memerintah, menyatakan pendapat dengan terukur dan melihat kesulitan yang harus diketahui; dan (4) *Supportive Style Traits*, gaya yang diam, tenang, penuh perhatian, menghindari kekuasaan, membuat keputusan dengan mempertimbangkan semua pihak. Sementara itu, Wood (2013) menyebutkan terdapat 6 (enam) gaya komunikasi politik yang terjadi dalam berbagai kegiatan

sosial termasuk pada bidang perpolitikan. *The Controlling Style*, bersifat membatasi, memaksa dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. *The Dinamic*, bersifat agresif karena pengirim pesan atau *sender* memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. *The Equalitarium Style*, ditandai dengan penyebaran pesan verbal secara lisan maupun tulisan yang bersifat dua arah. *The Relinguhhing Style*, yang bersedia menerima pesan, pendapat dan gagasan orang lain daripada memberi perintah. *The Structuring Style*, yang memanfaatkan pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan. *The Withdrawal style*, tidak ada keinginan dari orang-orang yang menggunakan gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain karena ada beberapa persoalan ataupun antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut.

Di Indonesia, pelaku politik dengan masyarakat seakan tidak memiliki batas. Selain menunjukkan kedekatan kepada masyarakat, ini pula akan menjadi ciri khas pembeda pelaku politik tersebut dari politikus lainnya. Pengamat politik, Effendi Ghazali dari Universitas Indonesia, membuat tiga karakteristik dalam gaya komunikasi politik Ahok yang kini tidak menjadi kader partai manapun setelah keluar dari Gerindra. Pertama gaya komunikasi Ahok yang menuntut pembuktian terbalik. Gaya komunikasi pembuktian terbalik itu terlihat ketika Ahok berkonflik dengan DPRD DKI 2016 Jakarta soal dana siluman. Gaya komunikasi yang kedua Ahok, urusan Jakarta tidak ada orang yang lebih tahu daripada dirinya. Tidak ada orang Jakarta yang lebih tahu apa persoalan Jakarta dan apa solusinya. Kondisi ini membuat Ahok sulit mendengarkan pendapat orang lain. Lalu gaya komunikasi Ahok yang ketiga adalah gabungan dari dua gaya sebelumnya. Ahok cenderung melontarkan pernyataan secara terang-terangan, cenderung frontal. Jika agak kelewatan, Ahok terkesan meremehkan atau merendahkan lainnya (Firdaus, 2015).

Gaya komunikasi yang keras, arogan sering sekali dibanding-bandingkan dengan pendahulunya Jokowi, tidak sedikit isu yang menyerang Ahok selama memimpin DKI Jakarta, namun tidak sedikit yang menyatakan Ahok tidak takut terhadap isu tersebut dikarenakan asumsi dirinya langsung dilindungi oleh Presiden. Seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dipukul-ratakan sesuai keinginan semua masyarakat. Ahok dan Jokowi secara kultur memiliki karakter yang sangat berbeda. Ahok merasa sedikit kesulitan meniru gaya

komunikasi Jokowi yang terlihat *high context culture* (HCC), begitupun Jokowi akan sangat susah meniru gaya Ahok yang cenderung *low context culture* (LCC). Setiap kebudayaan mengajarkan cara-cara tertentu dalam proses pertukaran komunikasi. Menurut Hall, menjelaskan terdapat istilah *High Context Culture* (HCC) dimana sebuah kebudayaan masyarakat HCC umumnya bersifat implisit, mengharapkan agar komunikator menggunakan cara-cara yang lebih praktis dalam mengakses informasi dalam variasi situasi apapun. Sebaliknya, *Low Context Culture* (LCC) yakni bersifat eksplisit dan banyak informasi yang komunikator sampaikan belum atau kurang diperhatikan dalam nilai, norma dan sistem kepercayaan mereka (Liliweri, 2007).

Gaya komunikasi Ahok kemudian menjadi sebuah masalah ketika terkena kasus dugaan penistaan agama atas pidato yang disampaikan pada pertemuan dengan para nelayan pada tanggal 27 september 2016 bertempat di kepulauan seribu. Isi pidato tersebut menyebutkan salah satu ayat di dalam Alqur'an yaitu surat Al-Maaidah ayat 51, "*Saya sudah sampaikan berkali-kali keuntungan program untuk kesejahteraan. Ada ibu-ibu di depan kurang respon. Saya nebak-nebak, apakah karena uang*". Ahok mengaku teringat dengan zaman saat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah di Bangka Belitung saat melihat seorang ibu yang tidak merespon. Ahok menjelaskan bahwa ibu-ibu di kepulauan Seribu terlihat sangat polos. Ia berasumsi ibu tersebut menginginkan programnya, tetapi tertahan karena Surat Al-Maidah ayat 51 yang dipakai lawannya di Belitung untuk membuatnya kalah. Pada akhirnya kasus ini berbuntut panjang hingga menjadikannya seorang tersangka.

Mencoba menjelaskan kasus di atas Pengamat politik Dr. Ade Armando, M.Sc. sebagai pakar komunikasi SMRC menyatakan pendapat tentang gaya komunikasi politik di Indonesia, pada era demokrasi seperti saat ini masyarakat harus terbiasa mendengar kata atau hal yang kita tidak suka. Apa konteks komunikasi dan apa pesan dan maksud. Pada era demokrasi ini masyarakat diperbolehkan mengkritik dengan cara yang bijaksana. Permasalahan yang timbul adalah boleh atau tidak, seberapa efektif, dan apa kepentingannya dalam konteks komunikasi yang dilakukan oleh komunikator sebagai sumber dari pesan politik.

Sehingga penelitian ini fokus pada gaya komunikasi politik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok memiliki gaya komunikasi yang sangat sensasional. Gaya komunikasi Ahok yang tidak bisa mengendalikan kalimatnya dengan baik, sering bicara dengan blak-blakan, dikenal arogan di berbagai kesempatan seakan menentang siapapun yang dia anggap tidak baik, terutama mereka yang memang berseberangan pendapat dengannya. Saat Ahok memasuki tahun ke-2 memimpin DKI periode kalender 2016-2017 ini justru ada hal yang menarik dari cara komunikasi Gubernur non-aktif DKI Jakarta ini, terlihat lebih pendiam pada berbagai kegiatannya, baik dalam kampanye, berdiskusi dengan masyarakat, ataupun berbagai kegiatan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan analisis gaya komunikasi politik Ahok pada tahun 2014-2015 dan masa kerja aktif 2016-2017.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu penyelidikan kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, dalam suatu situasi (Emzir, 2012). Unit analisis penelitian ini yaitu Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Unit analisis merupakan salah satu segmen yang harus ditentukan dalam penelitian, objek penelitian yang spesifik dapat berupa individu, keluarga, organisasi, dan lainnya (Turner, 2008). Penelitian ini memilih unit analisis berupa individu selaku komunikator politik sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari informan. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang memiliki pengalaman berbeda namun memahami dunia politik. Terdapat tiga informan yang diwawancari untuk penelitian ini. Informan penelitian ini diantaranya pengamat politik, Dr. Iding Rosyidin, S. Ag., M. Si, seorang lulusan S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Bahasa Arab.

Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada bidang Ilmu Politik di Universitas Indonesia, dan S3 melanjutkan studi Ilmu Komunikasi di UNPAD dengan membuat disertasi tentang komunikasi politik. Saat ini Dr. Iding mengampu mata kuliah komunikasi politik di FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan menjabat sebagai Kaprodi FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain sebagai dosen aktif di FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Iding juga merupakan seorang pengamat politik pada beberapa media televisi swasta yang ada di Indonesia.

Ana Sabana Azmi, M. IP, merupakan dosen tetap di FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mulai mengajar tahun 2012 yang berfokus pada isu politik migran, demokrasi politik perempuan. Saat ini mengajar pada bidang sosiologi politik. Latar belakang pendidikan S1 lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Komunikasi penyiaran Islam, dan S2 lulusan FISIP Universitas Indonesia.

Suranto, M.Si, merupakan seorang dosen di Universitas Tarumanagara Fakultas Ilmu Komunikasi dan saat ini beliau memegang mata kuliah komunikasi politik. Latar belakang pendidikan berasal dari Ilmu Komunikasi. Beliau menempuh pendidikan pertama untuk S1 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Pendidikan berikutnya S2 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, dan sedang dalam proses S3 di tempat yang sama yaitu Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia.

Wawancara dilakukan secara terpisah di antara para informan. Instrumen yang digunakan antara lain *tape recorder* untuk merekam wawancara. Adapun peneliti tetap menjadi instrumen utama dalam penelitian kualitatif (Cangara, 2016). Data yang diperoleh dari para informan, dilakukan analisis data dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Turner (2008) menjelaskan analisis data mengharuskan seorang peneliti untuk mengidentifikasi dengan teliti dan cermat. Peneliti melakukan data sebanyak mungkin dan kemudian disatukan secara terstruktur dari semua data yang diperoleh, sehingga dalam pembublikasiannya semua dapat memahami informasi dari hasil temuan tersebut.

Penelitian ini menilai kesahihan riset menggunakan analisis triangulasi, yaitu menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi mengajarkan peneliti untuk memahami secara baik dari ilmu yang menggambarkan epistemologis, ontologi, dan aksiologi (Turner, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merupakan Gubernur DKI Jakarta untuk masa jabatan pelaksana sah setelah gubernur sebelumnya Joko Widodo terpilih menjadi presiden pada pilpres 2014. Namun, perjalanan karir politik Ir. Basuki Tjahaja Purnama tentu tidak semuanya berjalan dengan sangat mulus, banyaknya kontroversi dalam gaya memimpin pemerintahan sangat banyak yang datang dan menguji karir politiknya. Beberapa kontroversi di antaranya adalah kasus lahan Rumah Sakit Sumber Waras, penertiban kawasan Kalijodo, penggunaan kata-kata kasar, dan pernyataan terkait dengan dibohongi menggunakan surah Al-Maidah 51 yang memicu tanggapan keras berupa rangkaian Aksi Bela Islam. Kasus yang paling dramatis adalah terduga menjadi penistaan agama yang akhirnya menyeret Ahok mendekam di Mako Brimob Kelapa Dua selama dua tahun.

Kasus ini bermula dari sebuah potongan video Ahok di kepulauan seribu pada september 2016 yang tersebar di media sosial. Ahok berkunjung ke kepulauan seribu dalam rangkaian mensosialisasikan program budidaya ikan kerapu. Ahok menyintir ayat Al- Qur'an surat Al-Maidah 51. Dari durasi pidato full adalah 40 menit, dan video yang tersebar di media sosial hanya dengan durasi 13 detik dan terdapat perkataan Al-Maidah 51. Namun pernyataan ini menjadi kontroversi. Ini merupakan salah satu bentuk konkret dari kegiatan komunikasi politik di mana elit politik bertindak selaku komunikator (Ardial, 2008). Pada 9 Mei 2017 Ahok dinyatakan mendapat vonis dua tahun penjara, ini merupakan hasil dari rangkaian panjang atas kasus penistaan agama yang mana lebih dari 20 kali sidang sebelum akhirnya diputuskan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh hakim, Dwiarso Budi Santriarto atas kasus penodaan agama.

Pengamat politik, Iding Rosyidin menjelaskan dalam komunikasi politik selain komunikator harus melakukannya dengan seefektif mungkin, maka pada sisi lain yang harus diperhatikan adalah bagaimana upaya proses dari pesan tersebut baik untuk komunikan. Proses dimulai dari pemilihan pesan, media penyampaian, dan apa yang akan menjadi kebutuhan komunikan, sehingga dengan pengelolaan yang baik maka akan mendapatkan *feedback* sebagai bentuk komunikasi yang berhasil.

Melakukan komunikasi politik tentu tidak selamanya dapat berjalan dengan harapan yang telah ditetapkan. Dan Nimmo (2012) menyebutkan komunikasi politik pada dasarnya adalah semua orang yang berkomunikasi tentang politik, mulai dari obrolan di warung kopi hingga sidang parlemen untuk membahas konstitusi negara. Adapun komunikator politik di antaranya politisi, yaitu orang yang memegang jabatan dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mereka memegang jabatan itu bisa melalui pemilihan, ditunjuk, atau melalui pengangkatan. Pekerjaan mereka sebagai pejabat negara adalah aspek utama dari kegiatan politik yang mereka lakukan. Terdapat permasalahan pada komunikator politisi yang terkadang membuat pesan tersebut tidak sampai pada komunikan dalam hal ini adalah masyarakat.

Ana Sabana Azmi menjelaskan:

“Komunikator itu yang saya perhatikan adalah mereka tidak mendahulukan kepentingan publik namun mendahulukan kepentingan pribadi dan sekelompok orang, dengan demikian pesan yang disampaikan biasanya kurang dapat diterima oleh komunikan. Terlebih pada saat ini komunikan sudah pintar dalam memilih dan mengelola berita, mereka terbuka secara politik”. (14/08/2017)

Iding Rosyidin memaparkan selain terdapat kepentingan di dalam komunikasi politik, komunikator juga terkadang mendapatkan komunikasi intrapersonal yang harus dibenturkan dengan interpersonal atau tujuan organisasi atau partai. Iding Rosyidin juga menjelaskan komunikator juga akan terikat dengan aturan organisasi.

“Demokrasi itu adalah ukurannya aturan organisasi, tidak semata merta bisa berbicara secara bebas. Artinya ada etika-etika yang harus diikuti.” (14/08/2017)

Atas banyak pertimbangan dalam melakukan komunikasi politik, maka seorang komunikator harus mampu memainkan perannya sebaik mungkin untuk mencapai apa yang telah ditetapkan secara bersama dan organisasi. Selain itu,

seorang aktor politik juga harus memainkan perannya demi mencapai tujuan mempertahankan kekuasaan individu ataupun kelompok dari pada kepentingan khalayak umum masyarakat.

Pada proses komunikasi politik, terdapat profesional yang merupakan mereka yang datang dari suatu organisasi yang datang bukan dari orang komunikasi, namun memahami bagaimana melaksanakan komunikasi politik yang baik, seharusnya dapat melakukan komunikasi tanpa embel-embel politik kepentingan. Iding Rosyidin menyatakan dapat menempatkan diri adalah hal terbaik yang bisa dilakukan. Ia menyatakan:

“Komunikator profesional juga terikat dengan etika organisasi, jadi mereka harus bisa menempatkan diri dengan baik”. (14/08/2017)

Pada komunikator profesional tentu banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatannya, karena komunikasi politik profesional tidak dipungkiri akan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan sekelompok untuk meminta bantuan upaya proses komunikasi politik dapat dilakukan dengan baik. Sebagaimana profesional promotor, merupakan orang yang dibayar untuk mendahulukan kepentingan pelanggannya. Apa yang harus mereka sampaikan kadang-kadang bertentangan dengan dirinya, tetapi hal ini tidak berarti subjektivitas mereka hilang begitu saja, hanya apa yang harus didahulukan ialah kepentingan pelanggannya (Subiako, 2012). Bukan tetapi dengan adanya kepentingan para profesional dapat dipukul rata begitu saja, karena masih ada komunikator profesional yang menyampaikan pesan politiknya untuk memperjelas keadaan politik. Mempertahankan ojetivitas juga perlu dilakukan sebagai bentuk menarik simpatik masyarakat untuk mempertahankan sebuah citra komunikator profesional bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan atas dasar kepentingan politik dan komunikan.

Selain itu, komunikator aktivis juga mnenjadi salah satu aktor politik yang terlibat dalam menyuarakan suara lebih leluasa dikarenakan tidak memiliki kepentingan pada kelompok tertentu. Aktivis sebagai komunikasi politik adalah orang yang bertindak sebagai saluran organisasi dan internasional yang menyampaikan informasi tentang politik kepada warga negara biasa (Wahid, 2016).

Suranto sebagai seorang akademisi komunikasi memiliki pandangan yang serupa, namun pada ia melihat ke arah politik berkesinambungan. Ia menyatakan:

“Kalau dilihat dari level aktivis ini merupakan lanjutan dari pilpres 2014. Aktivis pro Jokowi tetap membela Ahok, dan aktivis lain menyerang Ahok. Jadi level aktivis 2014 sampai sekrang sama pertarungannya” (14/07/2017).

Melihat penjelasan ini maka, diartikan bahwa keleluasaan dan kebebasan yang didapatkan oleh komunikator aktivis tidak serta merta mereka terlepas dari berbagai kepentingan. Pada saat ini komunikator aktivis yang benar-benar berbicara atas dasar membela yang seharusnya akan sulit dibedakan. Tidak sedikit aktivis yang pada akhirnya masuk ke partai dan kemudian tidak dapat menyuarakan kebebasannya dikarenakan terikat etika organisasi dan ikut sistem.

Adapun gaya komunikasi politik pada setiap politisi sebagai komunikator tentu saja tidak dapat dipukul rata dikarenakan mereka memiliki ciri khas tersendiri. Dalam hal penelitian ini yang akan dicari informasinya adalah Ahok sebagai objek utama.

“.....Ahok merupakan seorang yang “hambel” kemudian salah satu komponen seorang leader pada diri Ahok. Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa saya terkait pengusuran di “kampong pulo” merupakan salah satu pengusuran yang pernah dilakukan Ahok, hasil wawancara sebagian menyatakan Ahok arogan, ahok keras, tidak pandang bulu. Dan ada juga masyarakat yang menyatakan apa yang dilakukan Ahok itu demokratis. Ahok itu lebih suka menyatakan apa yang ada di dalam pemikirannya dia sampaikan, spontanius, arogan, tegas karena dia memang tidak pandang bulu untuk menyatakan seseorang salah” (14/08/2017).

Pada suatu konteks gaya komunikasi politik yang dimiliki seperti Ahok ini perlu dilakukan dalam menata sistem birokrasi yang sudah didengungkan oleh pemerintah sejak orde baru namun belum membuahkan hasil sampai saat ini. Namun gaya komunikasi yang lebih *low context culture* seperti Ahok ini belum tentu baik juga untuk Indonesia yang demokratis yang sudah membiasakan diri dengan *high context culture*.

Iding Rosyidin menjelaskan:

“Gaya komunikasi itu seharusnya cenderung dengan apa yang terjadi pada realitas yang ada di depan mereka. Gaya komunikasi politik juga tidak dapat dipaksa, misalkan Ahok yang memiliki gaya komunikasi blak-blakkan dalam ilmu komunikasi dikenal dengan Low Context Culture (LCC) cenderung apa adanya dan blak-blakan, dan itu biasanya sudah terkait sebagai karakternya sebagai orang. Ahok dilahirkan di Bangka dengan gaya yang cenderung seperti umunya orang Sumatra...Tidak bisa dikatakan itu baik atau buruk, sesuai dengan

kebutuhan saja, pada suatu konteks komunikasi seperti Ahok diperlukan. Ketika masyarakat sudah sangat pemisif terhadap koruptor tentang korupsi maka gaya seperti Ahok ini diperlukan. Tapi tidak semua dapat dipukul rata seperti itu, karena psikologis setiap orang lain-lain, cara merespon juga berbeda, maka gaya komunikasi seperti itu bisa saja kurang tepat dengan culture masyarakat Indonesia secara umum High Context Culture (HCC) ...” (14/08/2017)

Para pengamat politik menilai pandangan kasat mata yang melekat dengan seorang Ahok adalah arogan, blak-blakan, dan semua yang disampaikan itu berbeda tipis antara tegas atau arogan. Gaya komunikasi yang dilakukan oleh seorang Ahok tidak hanya tergantung pada konteksnya, namun ditelaah dari bagaimana pesan komunikasi itu dibingkai dengan baik sebagai upaya memberikan edukasi kepada komunikannya. Bahwasannya Ahok adalah pemegang mandat dari program dan janji yang mungkin dilontarkan Jokowi masih saat menjadi gubernur dan harus diselesaikan oleh Ahok dengan mempertimbangkan banyak aspek dalam pelaksanaannya.

Temuan ini senada dengan temuan pada penelitian yang dilakukan Pratiwi (2019) yang mengkaji gaya komunikasi Ahok dari perspektif Komunikasi Lintas Budaya. Ia dalam temuannya menyatakan bahwa sebagai seorang elit politik, Ahok cenderung menggunakan *Low Context Culture* (LCC) atau komunikasi konteks rendah yang sangat bertolak belakang dengan konteks komunikasi yang biasa digunakan oleh pejabat di Indonesia lainnya. Berdasarkan budaya yang dianut, elit politik dan pejabat Indonesia cenderung menggunakan komunikasi konteks rendah dalam memimpin. Namun Ahok berkebalikannya. Ia lebih suka secara terus terang dalam mengungkapkan ketidaksukaannya kepada keasalahan orang lain.

Kejelasan dalam melakukan komunikasi politik seorang Ahok tentu tidak lepas dari pengaruh ethos, phatos, dan logos yang akan melekat pada setiap individu termasuk Ahok. Ana Sabana Azmi, berupaya menjelaskan bagaimana ke tiga poin tersebut dalam komunikasi politik Ahok.

“.....Phatos secara pengetahuan bisa juga dilihat dari kepeduliannya terhadap pengembangan SDM dengan waktu yang cukup singkat memimpin DKI Jakarta. Melakukan perubahan itu sebenarnya harus memiliki waktu yang cukup panjang.....”. (14/08/2017)

Adapun Iding Rosyidin menjelaskan:

“...Logos dia juga paling rasional di pemimpin DKI Jakarta, contohnya pada saat debat kemaren, penyampaian yang paling lugas ya Ahok, logos dapat juga terkait dengan argumen”. (14/08/2017).

Sementara itu, Suranto juga mencoba menjelaskan menurut pandangannya:

“Dari sisi ethos gaya komunikasi banyak yang menabrak dari gaya si Ahok ini, dari segi estetika ini lumayan dalam artian Ahok dapat menampilkan hal yang berbeda, mungkin untuk sebagian orang itu indah, menarik, dan sebagian orang melihat itu kasar. Kenapa bagus, karena dia punya positioning sendiri. Kemudian logos cukup logis yang disampaikan, tapi kalau komunikasi itu harus dilihat framing. Tapi secara keseluruhan kalau saya melihat gaya komunikasi politik Ahok unik dan menarik publik.....” (14/07/2017).

Ketiga informan ini menyatakan bahwa Ahok dalam melakukan komunikasi politik sebetulnya tidak begitu buruk dari segi ethos dan logos, yang sedikit memiliki permasalahan justru pada phatos yaitu terkait psikologi seorang komunikator tersebut. Melalui adanya penjelasan ini maka akan muncul pernyataan apakah selama memimpin pemerintahan DKI Jakarta gaya komunikasi yang dilakukan terdapat perubahan atau tetap konsisten. Ketiga informan menyuarakan hal yang sama, yakni Ahok dalam melakukan komunikasi politiknya selama dua tahun menjadi gubernur DKI Jakarta tetap memiliki gaya yang konsisten.

Gaya komunikasi politik seorang Ahok pada hasil wawancara terhadap tiga informan adalah seperti berikut ini, *directorstyle traits* Ahok merupakan orang yang memiliki salah satu poin penting untuk menjadi seorang pemimpin. Ahok dalam menyelesaikan suatu permasalahan memiliki gaya yang agak sedikit membingungkan antara tegas dan arogan. Namun gaya komunikasi ini baik dalam konteks menekan mereka yang akan melakukan suatu tindakan salah pada kegiatan politik.

Pada penelitian ini gaya komunikasi politik Ahok mengidentifikasi model *director style traits*. Ahok dalam melakukan komunikasi politik selalu terlihat begitu aktif dan spontanitas sebagai seorang gubernur yang memiliki begitu banyak pekerjaan dan harus menjawab pertanyaan para wartawan ataupun masyarakat maka dia dituntut bekerja dalam suatu tekanan. Namun pada saat menjalin komunikasi politik Ahok berusaha memberikan apa yang terdapat pada pemikirannya secara aktif disampaikan kepada para komunikannya. Ahok melakukan gaya komunikasi politik yang cenderung *to the point* dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Gaya komunikasi ini dalam ilmu komunikasi dikenal dengan istilah *low context culture*, gaya komunikasi ini lebih cenderung apa adanya, tidak bertele-tele, dan cepat. Secara umum komunikasi memang tidak

dibataskan karena memang tidak memiliki batasan sampai saat ini. Pada sisi lain gaya komunikasi politik Ahok ini belum dapat diterima oleh semua masyarakat dikarenakan sudah terbiasa dengan gaya politik bersifat *hight context culture* dalam menjalankan suatu kegiatan politik.

Melalui gaya komunikasi politik Ahok ini tidak dapat dinyatakan baik atau buruk dalam politik Indonesia yang demokratis ini. Maka komunikasi yang dilakukan oleh Ahok ini cenderung jarang dimiliki oleh para politisi. Oleh karena itu dapat menempatkan diri dan dalam konteks tertentu maka gaya komunikasi politik jenis ini mungkin dapat berjalan efektif sesuai pada kebutuhannya. Sementara pada sisi lain, gaya komunikasi politik yang dilakukan oleh Ahok yang harus dipertahankan adalah bagaimana upaya memberikan informasi apa adanya, mengutamakan kejujuran dan tidak ada yang ditutup-tutupi dalam memberikan suatu penjelasan pada komunikasi politiknya.

Reflectative style traits pada diri seorang Ahok dalam upaya melakukan komunikasi politik yang mana merupakan sebagai sosok publik figur yang akan menjadi perhatian masyarakat sebagai penerima pesan atas isi komunikasi politik. Gaya komunikasi yang sudah terbentuk pada diri Ahok merupakan produk masa lalunya yang akan membutuhkan proses perubahan, di mana perubahan tersebut dapat dilakukan dengan cara menggunakan bantuan orang ke tiga, baik itu adalah tim penasihat ataupun kerabat dekatnya. Komunikasi politik yang dilakukan oleh Ahok memang terkesan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, namun pada pelaksanaannya tidak mungkin seseorang melakukan hal tersebut setiap waktu tanpa sebab yang pasti. Salah satu kelemahan seorang Ahok menjalankan komunikasi politik sebagai komunikator atas pesan-pesan yang disampaikan kepada orang lain tanpa memandang bulu.

Supportive style pada gaya komunikasi politik seorang Ahok adalah tidak selalu arogan pada setiap waktu. Pada saat melakukan suatu komunikasi banyak pertimbangan yang dilakukan oleh Ahok terkait berbagai prosedur hingga dampak yang diberikan dari suatu program. Ahok dalam melakukan komunikasi politik dia dapat membuat suasana menjadi cair ketika dalam pekerjaan tersebut tidak ditemukan sesuatu yang janggal. Sementara itu, Ahok akan arogan ketika

menemukan sesuatu yang tidak beres dan pemberitaan yang sifatnya hanya memberikan informasi palsu dan lain sebagainya.

Supportive style traits menjadi seorang pemimpin harus mampu memutuskan atas pertimbangan banyak orang dalam konteks ini adalah masyarakat. Pemimpin harus memberikan informasi yang jelas dari awal sampai akhir sehingga tidak membingungkan masyarakat. Ahok dapat melakukan gaya komunikasi ini dengan baik pada saat pelaksanaannya, menyampaikan secara lugas dan jelas. Mulai dari permasalahan, mencari suatu solusi, dan sebisanya mengerjakan secara langsung. Pertimbangan inilah yang bisa menarik simpatisan dari para komunikan karena merasa sesuai dengan harapan.

Gaya komunikasi politik yang lemah pada diri Ahok adalah kontrol diri dalam komunikasi yang dibangun oleh Ahok menjadikan kelemahan paling menonjol, pada satu sisi ingin menyampaikan bahwa semua orang dalam pemerintahan, politik, dan masyarakat secara umum adalah sama. Ketika perselisihan pendapat Ahok akan melayani di tempat dan langsung beradu argumen dalam kontek pemahaman masing-masing. Gaya komunikasi yang tidak kontrol menjadi corong bagi lawan Ahok dalam upaya menyerang karir politik dan menyerang pemerintahan yang ada saat ini secara keseluruhan.

SIMPULAN

Penelitian dengan topik gaya komunikasi politik seorang Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya komunikasi seseorang perlu diperhatikan dari aspek yang sangat luas dan cukup mendalam untuk mendapatkan sebuah arti yang benar dan sesuai dari maksud komunikator politik tersebut. Gaya komunikasi seorang pemimpin sebaiknya adalah menyampaikan pesan dengan cara yang benar dan dapat mengontrol diri, diperbolehkan sesekali menyampaikan pesan dengan keras dalam hal kebaikan pemerintahan dan perpolitikan tetapi dengan catatan tidak menyinggung seseorang atau suatu kelompok.

Perbedaan cara komunikasi seseorang harus menjadi pertimbangan untuk saling memahami antara rekan komunikasi. Upaya menjauhkan dari hal yang tidak diinginkan maka komunikasi yang baik itu harus dilakukan dengan proses yang

baik pula. Sebuah pesan harus dijelaskan dengan memperhitungkan seberapa besar timbal balik yang akan ditimbulkan dari komunikasi politik tersebut. Pesan sebaiknya tidak menimbulkan permasalahan pada berbagai elemen komunikasi dikarenakan perbedaan pendapat. Kelebihan seorang Ahok adalah memiliki *powerfull* dalam kinerjanya, memiliki *style* sendiri, dan itu membedakan Ahok dengan politikus lainnya. Kelemahan seorang Ahok dalam menjalankan komunikasi politik adalah menyikapi semua permasalahan yang ada dengan kurangnya kontrol diri dalam penyampaian pesan politiknya, jika gaya komunikasi politik tidak hanya mengandalkan reflek dan dapat mengontrol diri maka dapat membangun empati terhadap masyarakat yang dia pimpin.

Keterbatasan ruang dan waktu dalam penelitian ini membuatnya belum begitu sesuai dengan yang diharapkan, untuk penelitian akan datang diharapkan dapat mengembangkan konsep-konsep yang belum dapat dijelaskan pada penelitian ini. Penelitian ini hanya membahas bagaimana gaya komunikasi politik, dari sub-judul dapat dikembangkan menjadi topik penelitian. Besar harapan penelitian ini menjadi referensi untuk perkembangan ilmu bidang komunikasi terkhusus komunikasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardial. (2008). *Komunikasi politik*. Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Media.
- Cangara, H. (2016). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Firdaus, H. (2015). *Tiga Kategori Gaya Komunikasi Politik Ahok*. Diambil kembali dari CNN Indonesia:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150601142425-20-56964/tiga-kategori-gaya-komunikasi-politik-ahok>
- Liliweri, A. (2011). *Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana.
- Liliweri, A. (2007). *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara.
- Nimmo, D. (2012). *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Merdeka Selatan.
- Pratiwi, A. (2019). Gaya Komunikasi Ahok Berdasarkan Perspektif Komunikasi Lintas Budaya. *Avant Garde*, 7(1), 42-57.
- Riswandi. (2009). *Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subiakto, H. (2012). *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Turner, L. H. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi*. Jagakarsa: Salemba Humanika.
- Wahid, U. (2016). *Komunikasi Politik: Teori dan Konsep*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wood, T. J. (2013). *Komunikasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Humanika.